

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Penelitian Terdahulu

Bagian ini meringkas banyak studi yang dilakukan sebelumnya dan terhubung dengan pekerjaan peneliti, dan kemudian memeriksa perbedaan dan persamaan di antara mereka.

Pertama, pada tahun 2021, Luqman Al Hakim dan kawan-kawan melakukan kajian dengan judul “Pemberdayaan Masyarakat Desa Plesungan Melalui Penyuluhan Pembuatan Makanan Desa dan Oleh-Oleh”.⁸

Kesulitan yang dimaksud antara lain dampak Covid-19, produktivitas masyarakat yang menurun, dan kompetensi masyarakat yang kurang memadai. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat (KKN-PPM) yang meliputi analisis potensi desa setempat, pemilihan peserta dan sosialisasi program, serta penyuluhan masyarakat dilakukan dalam penelitian ini.

Hasil dari penelitian ini adalah kegiatan sosialisasi kepada masyarakat yang dilaksanakan sebagai bagian dari Kegiatan Kuliah Kerja Nyata Program Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM). Kegiatan tersebut telah selesai dan berhasil memberdayakan masyarakat, khususnya ibu-ibu PKK di Desa Plesungan dan warga yang terdampak pandemi covid-19 agar lebih produktif. Mereka juga mendapat tanggapan positif dari berbagai pihak.

⁸ Al Hakim, L., Supeni, S., Khabibullah, M., & Skenoma, Y. (2021). Pemberdayaan Masyarakat Desa Plesungan Melalui Penyuluhan Pembuatan Oleh-Oleh Makanan dan Cenderamata Khas Desa. *Jurnal Abdimas PHB: Jurnal Pengabdian Masyarakat Progresif Humanis Brainstorming*, 4(1), 53-61. Diakses pada 29 September 2022

Kedua, kajian tahun 2018 berjudul “Strategi Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengembangan Desa Wisata Nglanggeran Kabupaten Gunung Kidul” yang dilakukan oleh Dinar Wahyuni.”⁹

Karena rendahnya keterlibatan masyarakat dalam pengelolaan pariwisata dan inisiatif pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata, keberhasilan suatu kawasan wisata belum menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat setempat.

Penelitian ini menggunakan teknik penelitian deskriptif kualitatif. Jelasnya, pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dilakukan melalui tiga strategi: peningkatan kesadaran, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan.

Kajian ini menyimpulkan bahwa pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Nglanggeran dicapai dengan tiga strategi yaitu penyadaran, peningkatan kapasitas, dan pemberdayaan. Karang Taruna Putra Bukit Mandiri melakukan penyadaran terhadap potensi desa Nglanggeran melalui sosialisasi dan kreativitas. Berbagai pihak membantu Desa Nglanggeran dalam pembangunan sarana penunjang wisata dan perluasan industri pariwisatanya. Teknik pemberdayaan masyarakat tersebut berhasil meningkatkan perekonomian masyarakat setempat. Selain itu, pertumbuhan

⁹ Wahyuni, D. (2018). Strategi pemberdayaan masyarakat dalam pengembangan desa wisata Nglanggeran, Kabupaten Gunung Kidul. *Jurnal Masalah-Masalah Sosial*, 9(1), 83-100. Diakses pada 29 September 2022

jumlah wisatawan setiap tahunnya telah mengangkat PAD Gunung Kidul melalui penjualan tiket.

Ketiga, penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Tyas Kusumah Admaja, Oktiva Anggraini dan Suwarjo pada tahun 2021 dengan judul “Desa Wisata Pentingsari; Upaya Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pengelolaan Desa Wisata”.¹⁰

Permasalahan yang diangkat pada penelitian tersebut yaitu obyek wisata belum dirawat atau dikelola dengan baik sejak erupsi merapi seperti pancuran dan watu dakon dan lainnya, pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan desa wisata Pentingsari.

Kesimpulan penelitian yaitu pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan Desa Wisata Pentingsari Umbulharjo, Cangkringan, Sleman, Yogyakarta secara umum berjalan dengan optimal, namun masih banyak pembenahan seperti, proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Pentingsari, kendala dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Pentingsari, aktor dalam proses pemberdayaan masyarakat di Desa Wisata Pentingsari.

¹⁰ Admaja, T. K., Oktiva, A., & Suwarjo, S. (2020). Desa Wisata Pentingsari; Upaya Pemberdayaan Masyarakat dalam Pengelolaan Desa Wisata. *Jurnal Manajemen Publik dan Kebijakan Publik (JMPKP)*, 2(2), 33-46. Diakses pada 29 September 2022

2.2 Kerangka Konsep

2.2.1 Pembangunan

Setiap orang atau sekelompok orang pasti akan mengharapkan suatu perubahan yang memiliki bentuk yang lebih baik bahkan lebih ideal dari keadaan yang ada sekarang; untuk mewujudkan harapan tersebut, tentunya harus membutuhkan perencanaan. Konsep pembangunan biasanya melekat pada konteks mempelajari perubahan; Pembangunan di sini diartikan sebagai suatu bentuk perubahan terencana. Untuk budaya yang belum berkembang atau baru berkembang, perencanaan pembangunan dianggap sebagai upaya yang lebih logis dan teratur.¹¹

Definisi "pembangunan" berbeda-beda untuk setiap orang, dari satu daerah ke daerah lain, dan dari satu negara ke negara lain. Meskipun demikian, secara umum diakui bahwa pembangunan adalah suatu proses perubahan.¹² Dalam konteks pembangunan bangsa (country building), Siagian (1994) mendefinisikan pembangunan sebagai “suatu usaha atau rangkaian prakarsa pertumbuhan dan transformasi yang direncanakan dan dilaksanakan dengan sengaja oleh suatu bangsa, negara, dan pemerintah, menuju modernitas.”¹³

¹¹ Susilawati, E. (2014). *Analisis Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau).

¹² Syamsul, Hadi. *Strategi Pembangunan*, Mahatir & Soeharto. Jakarta: Japan Foundation, 2005.

¹³ Digidowiseiso, K. *Teori pembangunan*, 2019, hlm 7.

Menurut Deddy T. Tikson (2005), pembangunan nasional juga dapat dilihat sebagai transformasi ekonomi, masyarakat, dan budaya yang disengaja melalui penggunaan strategi dan kebijakan yang bergerak ke arah yang dituju. Misalnya, pertumbuhan produksi yang meningkat atau cepat dari sektor industri dan jasa, yang meningkatkan bagian mereka dari pendapatan nasional, merupakan salah satu indikasi bagaimana struktur ekonomi berubah. Sebaliknya, perluasan industrialisasi dan modernisasi ekonomi akan mengakibatkan berkurangnya dan berbanding terbalik kontribusi dari sektor pertanian. Distribusi kemakmuran melalui pemerataan dalam memperoleh akses ke sumber daya sosial ekonomi, seperti pendidikan, kesehatan, perumahan, air bersih, fasilitas rekreasi, dan keterlibatan dalam proses pengambilan keputusan politik, dapat dianggap sebagai revolusi sosial. Pertumbuhan nasionalisme dan berbagai bentuk nasionalisme, serta modifikasi norma dan nilai masyarakat, seperti pergeseran dari spiritualisme ke materialisme/sekularisme, merupakan contoh dari transisi budaya. Transisi dari penguasaan material yang sangat dihargai, dari institusi mapan ke struktur logis kontemporer¹⁴

Kegiatan pembangunan di bidang sosial biasanya difokuskan pada pembinaan nilai dan sikap masyarakat yang lebih mendukung pembaharuan, pembangunan, pembangunan, dan pembangunan bangsa. Ini termasuk menumbuhkan inspirasi untuk semangat bisnis yang sukses. Terlebih lagi, pembinaan, dorongan, dan kehadiran energi semuanya dapat berkontribusi

¹⁴ Ibid. hlm 9

pada perkembangan masyarakat yang semakin matang. Sebenarnya, ada dua komponen mendasar dalam pembangunan: pertama, kesulitan material yang ingin diciptakan dan didistribusikan, dan kedua, masalah manusia yang menjadi katalisator dan pembangun manusia. Tujuan akhir pembangunan haruslah pertumbuhan manusia karena orang yang dibangun lebih cenderung kreatif, dan agar orang menjadi kreatif, mereka perlu merasa puas, aman, dan tidak takut. Pembangunan pada hakikatnya adalah proses perpindahan masyarakat dari satu negara ke negara lain guna mencapai tatanan sosial yang diinginkan; dalam proses transformasi ini, dua faktor harus diperhitungkan: kontinuitas dan perubahan. Ketertarikan antara kedua faktor tersebut menimbulkan dinamika dalam perkembangan masyarakat.

Rostow berpendapat perkembangan tingkat atau tahapan perkembangan yang dialami semua negara dapat digunakan untuk menjelaskan bagaimana negara yang belum berkembang menjadi negara maju. Menurut Rostow, suatu bangsa melewati lima tahap saat berkembang. Yaitu:

1. Masyarakat tradisional, yaitu budaya yang tidak menggunakan teknologi masa kini tetapi masih mengandalkan kekuatan fisik. Pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan tetap menjadi sektor ekonomi utama.
2. Budaya yang mulai banyak memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi kontemporer meletakkan dasar untuk berkembang menjadi negara industri.

3. Pertumbuhan ekonomi semakin meningkat, dengan sektor industri yang paling banyak mengalami kemajuan.
4. Masyarakat desa adalah masyarakat yang melakukan segala kegiatan ekonominya dengan menggunakan teknologi masa kini.
5. Masyarakat dengan tingkat konsumsi yang tinggi untuk penciptaan barang dan jasa berada pada era konsumsi masyarakat yang tinggi.

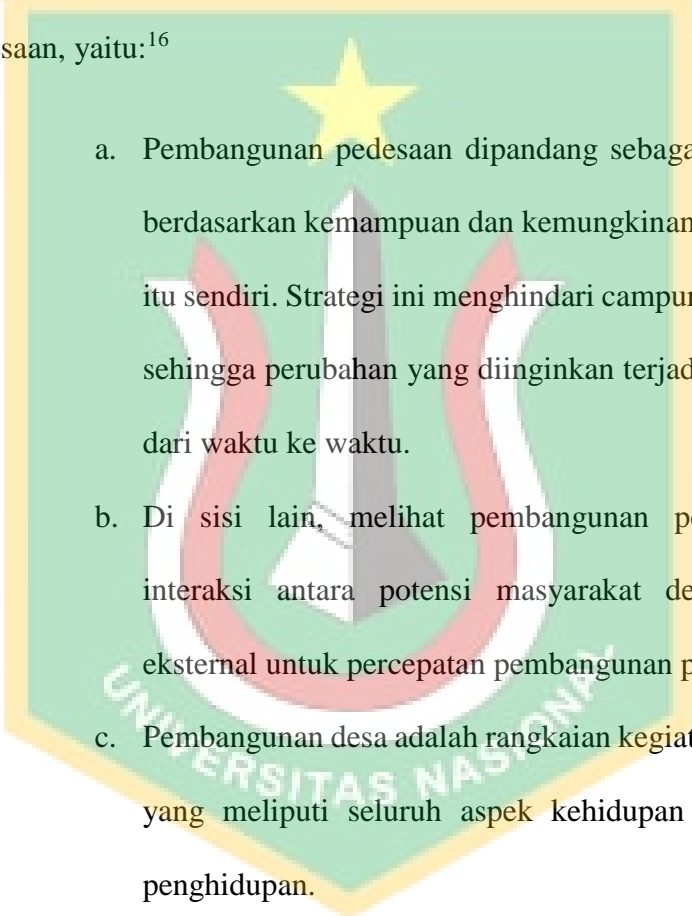
Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa pengertian mendasar dari “pembangunan yang berpusat pada manusia” adalah anggapan bahwa manusia adalah sasaran utama dan sumber daya yang paling strategis, sehingga pembangunan juga mencakup upaya terencana untuk meningkatkan kemampuan dan potensi manusia serta mengarahkan kepentingannya untuk berpartisipasi. dalam proses pengambilan keputusan mengenai berbagai hal yang berdampak pada mereka dan berusaha mengedepankan kekuatan manusia, bukan ketergantungan layanan yang menciptakan relasi tersebut.

2.2.2 Pembangunan Desa

Rostow (1971) mencatat bahwa konsep pembangunan tidak hanya memerlukan peningkatan output tetapi juga peningkatan output selama periode sebelumnya. Perkembangan berlangsung melalui fase yang berbeda: masyarakat tradisional, kondisi pra-peluncuran, peluncuran, gerakan menuju kedewasaan, dan konsumsi massal. Yang penting di antara fase-fase ini

adalah fase peluncuran, yang digerakkan oleh satu atau lebih industri. Ekspansi cepat sektor penting ini telah menarik sektor ekonomi yang kurang aktif.¹⁵

Meneliti pembangunan pedesaan dari beberapa sudut adalah mungkin. Menurut Haeruman (1997), ada dua pendekatan untuk menganalisis kawasan pedesaan, yaitu:¹⁶

- 
- a. Pembangunan pedesaan dipandang sebagai proses alamiah berdasarkan kemampuan dan kemungkinan masyarakat desa itu sendiri. Strategi ini menghindari campur tangan eksternal sehingga perubahan yang diinginkan terjadi secara bertahap dari waktu ke waktu.
 - b. Di sisi lain, melihat pembangunan pedesaan sebagai interaksi antara potensi masyarakat desa dan insentif eksternal untuk percepatan pembangunan pedesaan.
 - c. Pembangunan desa adalah rangkaian kegiatan pembangunan yang meliputi seluruh aspek kehidupan masyarakat dan penghidupan.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor: 72 Tahun 2005 tentang Desa, ayat (2) menyebutkan bahwa rencana pembangunan Desa disusun secara partisipatif oleh pemerintah Desa

¹⁵ Ilma'nun, L. L. *Model pengambilan keputusan tingkat desa (studi pada Desa Bator, Kecamatan Klampis, Kabupaten Bangkalan)* (Doctoral dissertation, UIN Sunan Ampel Surabaya). 2016.

¹⁶ Ibid. Hal 35

sesuai dengan kewenangannya, dan ayat (3) menyatakan bahwa Lembaga sosial desa wajib dilibatkan dalam penyusunan rencana pembangunan desa. Berikut ini adalah tujuan perencanaan pembangunan:

1. Koordinasi antar pelaku pembangunan.
2. Menjamin sinkronisasi dan sinergi dengan pelaksanaan pembangunan daerah.
3. Pastikan kohesi dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
4. meningkatkan partisipasi masyarakat
5. Menjamin pendayagunaan sumber daya Desa secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berjangka panjang.

Kebijakan perencanaan pembangunan Desa adalah seperangkat pedoman dan peraturan yang dianut atau dipilih dalam perencanaan pelaksanaan (pengelolaan) pembangunan di Desa yang meliputi segala aspek kehidupan dan penghidupan masyarakat untuk mencapai kesejahteraan masyarakat.

Dalam arti luas, pembangunan perdesaan meliputi berbagai bidang kehidupan, seperti ekonomi, sosial, budaya, politik, dan keamanan, serta memadukan peran pemerintah dan masyarakat dalam pengelolaannya dengan memaksimalkan penggunaan sumber daya pembangunan untuk terus meningkatkan kualitas. kehidupan dan kesejahteraan rakyat. Pembangunan

desa merupakan suatu cara yang dimaksudkan untuk meningkatkan status sosial ekonomi masyarakat tertentu.¹⁷

Pembangunan pedesaan juga dapat dilihat sebagai program yang dirancang untuk meningkatkan output, pendapatan, dan kesejahteraan dengan meningkatkan kualitas hidup di bidang pendidikan, kesehatan, dan perumahan.¹⁸

Oleh karena itu, pembangunan desa merupakan upaya bersama antara masyarakat dan pemerintah untuk menghasilkan perubahan positif melalui sumber daya desa, bantuan pemerintah, dan bantuan dari LSM. Dalam Pembangunan Desa, tujuan pembangunan terdiri dari dua bagian penting. Secara umum, ada dua ciri utama pembangunan desa:¹⁹

1. Pembangunan desa dalam aspek fisik, yaitu pembangunan yang tujuan utamanya dalam aspek fisik (sarana, prasarana, dan manusia) di wilayah perdesaan, seperti jalan desa, bangunan rumah, pemukiman, jembatan, bendungan, irigasi, tempat ibadah, sekolah, dll. Pembangunan fisik selanjutnya disebut Pembangunan Desa.
2. Pembangunan dalam unsur pemberdayaan manusia, yaitu pembangunan yang tujuan utamanya adalah aspek

¹⁷ Ginandjar Kartasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta : PT. Pustaka Cidesindo,1996). hlm. 392

¹⁸ Ibid. hlm .393.

¹⁹ Rahardjo Adisasmita, *Pembangunan Pedesaan*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2013) hal.17.

pembangunan dan perluasan kemampuan, keterampilan, dan pemberdayaan masyarakat di pedesaan sebagai warga negara, seperti pendidikan dan pelatihan, pengembangan usaha ekonomi, kesehatan, dan sebagainya. Aspek pembangunan ini selanjutnya disebut Pemberdayaan Masyarakat Desa.

Tujuan pembangunan perdesaan adalah agar penduduk tidak hanya mampu memenuhi kebutuhannya sendiri akan produk lain, tetapi juga mampu menyediakan produksi yang melimpah atau surplus sebagai sumbangsih bagi daerah, kota, atau wilayah lain yang membutuhkan produk. diproduksi di pedesaan. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki barang-barang unggulan yang dapat diproduksi secara berlebihan oleh penduduk yang kualitasnya ditingkatkan melalui pemberdayaan. Dengan demikian, akan terbangun jaringan industri dan perdagangan atau jaringan ekonomi pedesaan yang lebih maju, yang memungkinkan terjadinya arus jasa, uang, dan barang yang dapat menghidupkan kembali masyarakat pedesaan.

Diperlukan perencanaan untuk melaksanakan pembangunan desa yang mencapai hasil yang diinginkan. Penerapan perencanaan pembangunan harus berpegang pada prinsip dasar pembangunan daerah, yaitu dari masyarakat, oleh masyarakat, dan untuk masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat harus mampu mendeteksi kesulitan-kesulitan yang ada atau dihadapi di wilayahnya masing-masing. Selain itu, diperlukan kapasitas masyarakat lokal untuk mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah di daerah mereka masing-

masing. Potensi Potensi kawasan untuk pertumbuhan desa juga harus digali, digali, dan dikembangkan.

2.2.3 Pembangunan Masyarakat

Menurut Korten (Totok Mardikanto dan Poerwoko Soebianto, 2013:51-52), konsep pembangunan yang berpusat pada rakyat mempersepsikan upaya kreatif dari rakyat sebagai sumber utama pembangunan dan melihat kesejahteraan material dan spiritual mereka sebagai tujuan pembangunan yang harus dipenuhi. . Selain itu, Korten mengusulkan tiga topik penting untuk konsep perencanaan yang berpusat pada orang, yaitu sebagai berikut:²⁰

1. Penekanan pada mendukung dan membangun usaha swadaya untuk memenuhi kebutuhan yang kurang beruntung.
2. Pengetahuan bahwa meskipun sektor modern merupakan sumber utama pertumbuhan ekonomi konvensional, sektor tradisional merupakan sumber utama kelangsungan hidup sebagian besar rumah tangga miskin
3. Perlunya kelembagaan baru untuk meningkatkan kemampuan swakelola masyarakat miskin berbasis sumber daya lokal.

Aspek penting dari program pengembangan pemberdayaan masyarakat adalah program yang disusun oleh masyarakat itu sendiri, mampu memenuhi kebutuhan dasar masyarakat, mendorong partisipasi masyarakat miskin dan

²⁰ Mardikanto Totok . Pemberdayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik. Bandung: Alfabeta, 2013, hlm 51-52

kelompok terpinggirkan lainnya, dibangun dari sumber daya lokal, mempertimbangkan dampak lingkungan, tidak menimbulkan ketergantungan, dan berkelanjutan. Dalam proses pembinaan pemberdayaan masyarakat, komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam bentuk dukungan finansial dan sumber daya pendukung lainnya tetap penting.

Menurut Dirjen Bangdes dalam Susilawati (2014), *community development* pada dasarnya merupakan proses dinamis yang berkesinambungan dari masyarakat untuk mewujudkan keinginan dan harapan hidup yang lebih sejahtera, dengan strategi menghindari kemungkinan memojokkan masyarakat desa sebagai pengusung akses dari pembangunan daerah/kawasan. Program pengembangan masyarakat ini berorientasi pada masyarakat atau masyarakat itu sendiri, bukan pada birokrasi. Pengembangan masyarakat adalah tentang memberdayakan upaya lokal dan mempromosikan partisipasi masyarakat.²¹

2.2.4 Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ambar Teguh S., *empowerment* dapat didefinisikan sebagai berikut: “Empowerment berasal dari kata *power*, yang berarti tenaga, usaha, kapasitas untuk melakukan sesuatu atau kapasitas untuk bertindak. Selain itu, *empowerment* berasal dari kata bahasa Inggris”*empowerment*,” yang menurut Merriam-Webster dan Oxford English Dictionary, memiliki dua arti. Yang

²¹ Susilawati, E. (2014). *Analisis Program Pemberdayaan Lingkungan Sosial Komunitas Adat Terpencil (KAT) Suku Bonai Kabupaten Rokan Hulu* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Riau Sultan Syarif Kasim Riau).

pertama adalah memberikan kuasa atau kewenangan untuk memberikan kuasa atau wewenang, mengalihkan kekuasaan, atau mendelegasikan wewenang kepada pihak lain. Makna kedua adalah untuk memberikan kemampuan atau memungkinkan upaya untuk memberikan kemampuan atau keberdayaan.”²²

Menurut Sulistiyani, pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan. Dari perspektif ini, pemberdayaan diartikan sebagai proses perolehan daya, kekuatan, atau kemampuan, atau proses pengalihan daya, kekuatan, atau kemampuan dari orang yang memiliki kekuatan kepada orang lain yang kurang berdaya atau belum berdaya.²³

Menurut David Korten, pemberdayaan adalah suatu tindakan yang mengurangi ketergantungan dengan meningkatkan kapasitas kaum miskin untuk mengambil tindakan politik yang bebas dan positif atas nama mereka sendiri.²⁴

Menurut Ambar Teguh S, kondisi masyarakat dalam mendukung pembangunan yaitu pemberdayaan masyarakat menghasilkan masyarakat yang lebih baik. kognitif, kondisi kognitif adalah kemampuan berpikir berdasarkan informasi dan wawasan individu atau kelompok untuk menemukan jawaban atas masalah. Keadaan konatif adalah sikap perilaku

²² Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004, Hal. 78

²³ Ibid Hal. 82

²⁴ Moeljarto. *Politik Pembangunan Sebuah Analisis, Konsep, Arah, dan Strategi*. Yogyakarta: Tiara Wacana, 1993

masyarakat yang dibangkitkan dan dibimbing ke arah perilaku yang sensitif terhadap perkembangan dan pemberdayaan. Keadaan afektif adalah perasaan yang dimiliki masyarakat yang diantisipasi untuk diintervensi guna mencapai keberdayaan dalam sikap dan perilaku. Keterampilan psikomotorik adalah kemampuan yang diperoleh oleh suatu komunitas dalam upaya membantu kegiatan pertumbuhan kelompok tersebut.”²⁵

Berdasarkan pengertian-pengertian pemberdayaan di atas, dapat dikatakan bahwa pemberdayaan adalah suatu konsep yang mengarah pada upaya pengembangan budi pekerti umat dengan melaksanakan pembaharuan-pembaharuan yang bertujuan untuk menciptakan manusia-manusia yang berdaya. Pada hakekatnya pemberdayaan adalah upaya untuk mewujudkan lingkungan hidup manusia yang adil dan beradab secara struktural lebih berdaya guna dalam kehidupan keluarga, masyarakat, negara, wilayah, dan internasional, serta dalam bidang politik, ekonomi, dan bidang lainnya. Pemberdayaan mengacu pada upaya untuk meningkatkan kapasitas dan kemandirian sehingga individu dapat menyadari potensi bawaan mereka dan memikul tanggung jawab atas diri mereka sendiri dan lingkungan mereka.

2.2.5 Prinsip-Prinsip Pemberdayaan Masyarakat

²⁵ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004, Hal. 80

Menurut Sri Najiati, Agus Asmana, dan I Nyoman N. Suryodiputra, ada empat prinsip pemberdayaan masyarakat yaitu:²⁶

a. Prinsip persamaan

Premis utama yang harus dianut dalam proses pemberdayaan masyarakat adalah adanya persamaan atau kedudukan yang setara antara masyarakat dengan lembaga yang melaksanakan program pemberdayaan masyarakat, baik perempuan maupun laki-laki. Dengan membangun metode untuk berbagi pengetahuan, pengalaman, dan keahlian, lingkungan kesetaraan tercipta. Masing-masing menerima bakat dan kekurangan satu sama lain, memungkinkan untuk saling belajar.

b. Partisipasi

Prakarsa partisipatif, dipimpin masyarakat, direncanakan masyarakat, dilaksanakan, diawasi, dan dievaluasi adalah yang paling efektif untuk mendorong kemandirian masyarakat. Untuk mencapai tingkat ini, bagaimanapun, membutuhkan waktu dan proses pendampingan termasuk pembantu yang berkomitmen tinggi untuk pemberdayaan masyarakat.

c. Kemerdekaan atau kemandirian

Pengertian swasembada adalah menghargai dan mengutamakan kemampuan masyarakat di atas bantuan pihak lain. Gagasan ini tidak menganggap orang miskin sebagai objek yang tidak kompeten (yang berkekurangan), tetapi sebagai subjek yang memiliki kemampuan terbatas

²⁶ Sri Najiati, Agus Asmana, I Nyoman N. Suryadiputra. *Pemberdayaan Masyarakat di Lahan Gambut*. Bogor: Wetlands International – IP, 2005, Hal. 54

(yang berkekurangan). Mereka memiliki kemampuan menabung, pemahaman mendalam tentang keterbatasan usahanya, kesadaran akan kondisi lingkungannya, tenaga kerja yang rela, dan konvensi masyarakat yang sudah lama terbentuk.

d. Berkelanjutan

Sekalipun peran pendamping pada awalnya lebih mendominasi daripada peran masyarakat itu sendiri, program pemberdayaan harus direncanakan untuk keberlanjutannya. Namun lambat laun dan pasti, kedudukan pendamping akan menurun, dan akhirnya menghilang, karena masyarakat sudah mampu mengatur kegiatannya sendiri.

2.2.6 Tujuan Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Ambar Teguh Sulistiyani tujuan pemberdayaan adalah untuk membangun kemandirian individu dan masyarakat, meliputi kemandirian berpikir, bertindak, dan kontrol atas tindakannya.²⁷ Kemandirian masyarakat adalah suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat yang ditandai dengan kemampuan berpikir, memutuskan, dan bertindak dengan cara yang dianggap tepat untuk mencari pemecahan masalah dengan menggunakan daya kemampuan kognitif, konatif, psikomotorik, dan afektif, dan penyebaran sumber daya yang dimiliki oleh lingkungan internal masyarakat.

²⁷ Ambar Teguh Sulistiyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Graha Ilmu, 2004, Hal. 80

Pemberdayaan masyarakat desa bertujuan agar desa mampu melakukan tindakan kolektif sebagai satu kesatuan yang melibatkan berbagai pemangku kepentingan di tingkat pemerintah desa, masyarakat desa, dan pihak lainnya untuk mendorong partisipasi dan mendayagunakan kemampuan masyarakat Desa dalam proses pembangunan desa, merumuskan rencana pembangunan yang berpihak pada kelompok miskin, dan meningkatkan kapasitas dan kualitas sumber daya manusia di desa.²⁸

2.2.7 Tahap- Tahap Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat selamanya dengan kata lain pemberdayaan masyarakat berlangsung melalui suatu proses belajar yang dilakukan secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Pemberdayaan masyarakat tidak bersifat permanen; melainkan merupakan proses pembelajaran yang berlangsung secara bertahap hingga masyarakat mencapai kemandirian. Menurut Ambar Teguh Sulistiyani, tahapan-tahapan berikut harus diselesaikan:

1. Tahap pembentukan kesadaran dan perilaku yang mengarah pada perilaku sadar dan peduli, sehingga individu merasa perlu untuk meningkatkan kapasitas dirinya.
2. Tingkat transformasi kapabilitas terdiri dari penyampaian pengetahuan berwawasan, keterampilan untuk membuka

²⁸ *Bumdes.id*. Diakses pada 29 September 2022.

wawasan, dan keterampilan dasar agar individu dapat berpartisipasi dalam pembangunan.

3. Tahap pengembangan bakat dan keterampilan intelektual guna mendorong terbentuknya prakarsa dan kapasitas inovatif yang mengarah pada kemandirian.²⁹

2.2.8 Pengertian Desa Wisata

Menurut Chafid Fandeli, desa wisata adalah kawasan pedesaan yang mencerminkan keaslian desa dari segi kehidupan sosial budaya, adat istiadat, kegiatan sehari-hari, arsitektur bangunan, dan tata ruang desa, serta potensi yang dapat dikembangkan sebagai atraksi wisata, seperti atraksi, makanan dan minuman, souvenir, penginapan, dan kebutuhan wisata lainnya.³⁰

Elemen utama dusun wisata adalah penginapan dan atraksi. Dalam konteks ini, yang dimaksud dengan "akomodasi" adalah bagian dari tempat tinggal dan/atau unit-unit penduduk setempat yang didasarkan pada pengertian kawasan permukiman. Sedangkan atraksi adalah seluruh kehidupan sehari-hari penduduk lokal serta setting fisik lokasi desa yang memungkinkan terintegrasinya wisatawan sebagai peserta aktif dalam kegiatan seperti kelas tari, kelas bahasa, pelatihan prakarya, dan hal-hal

²⁹ Ambar Teguh Sulistyani. *Kemitraan dan Model-Model Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gama Media, 2004.

³⁰ Chafid Fandeli. *Perencanaan Kepariwisata Alam Yogyakarta*. Yogyakarta: Fakultas Kehutanan UGM.2002.

khusus lainnya. atraksi adalah seluruh kehidupan sehari-hari penduduk setempat.³¹

Desa wisata adalah bentuk integrasi antara atraksi, penginapan, dan fasilitas pendukung yang disajikan dalam struktur kehidupan masyarakat yang terintegrasi dengan praktik dan adat istiadat yang berlaku.³²

2.2.9 Pengelolaan Desa Wisata

Dalam proses manajemen, menurut Nanang Fatah, tugas utama seorang manajer atau pemimpin adalah merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, dan mengendalikan. Dengan demikian, manajemen digambarkan sebagai tindakan merencanakan, mengatur, mengarahkan, dan mengatur semua bidang operasi organisasi untuk mencapai tujuannya secara efektif dan efisien.³³

Menurut Ika Putra (Ratna Sari, 2010, hlm. 27), desa wisata adalah “bentuk lingkungan pemukiman dengan fasilitas yang sesuai dengan tuntutan wisatawan dalam menikmati atau mengenal dan menghayati atau mempelajari keunikan desa dengan segala daya tariknya dan dengan tuntutan kegiatan masyarakat (kegiatan pemukiman), interaksi sosial, dan kegiatan

³¹ Argyo Dermantoto. *Partisipasi Masyarakat dalam Pengelolaan Wisata Air Terjun Jumog Desa Berjo Kecamatan Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar*. Surakarta: Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sebelas Maret, 2009, Hal. 125

³² Wiendu Nuryanti. *Concept, Perspective and Challenges, makalah bagian dari Laporan Konferensi Internasional mengenai Pariwisata Budaya*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1993, Hal. 2-3.

³³ Nanang Fatah. *Landasan Manajemen Pendidikan*. Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.

adat setempat, dll.” Sehingga diharapkan dapat menimbulkan suasana damai, rekreatif, dan berwawasan lingkungan.”³⁴

Dapat penulis simpulkan, berdasarkan pemahaman mereka tentang pengelolaan dan desa wisata, bahwa pengelolaan desa wisata adalah rangkaian usaha atau kegiatan yang terdiri dari perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan program kerja yang melibatkan peran serta masyarakat secara aktif dan didukung oleh sarana akomodasi untuk tujuan mengembangkan potensi

2.3 Kerangka Berpikir

Pemberdayaan masyarakat adalah proses menciptakan, mengembangkan, dan memperkuat kualitas masyarakat dengan kegiatan yang disesuaikan dengan karakteristik dan potensi masyarakat untuk mencapai kemandirian



³⁴ Ratna Titi Sari. Jalan-Jalan Yuk! Jogja&Solo. Yogyakarta: Atma Media Press, 2004.

Gambar 2.1 Kerangka Teori

